

PENGADILAN AGAMA MAUMERE

LAPORAN KEUANGAN

Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2021

JL. DIPONEGORO - MAUMERE

SIKKA – NUSA TENGGARA TIMUR 86615

Telp. (0382)21134 Fax. (0382) 23514

e-mail : pa.maumere@gmail.com



LAPORAN KEUANGAN

PENGADILAN AGAMA MAUMERE

Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2021

BAGIAN ANGGARAN 005.01

BADAN URUSAN ADMINISTRASI

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

JL. DIPONEGORO - MAUMERE

Telp. (0382) 21134 Fax. (0382) 23514

SIKKA - Nusa Tenggara Timur 86615

e-mail : pa.maumere@gmail.com

KATA PENGANTAR

Kata Pengantar

Sebagaimana diamanatkan Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018, Menteri / Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran / Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara / Lembaga yang dipimpinnya.

Pengadilan Agama Maumere adalah salah satu Entitas Akuntansi di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggung jawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasi, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Pengadilan Agama Maumere mengacupada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan, serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pemakai laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kantor Pengadilan Agama Maumere. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Maumere, 31 Desember 2021
Kuasa Pengguna Anggaran,
Sekretaris,

JURI ENDO, S.H.
NIP. 19710421 199603 1 002

DAFTAR ISI

Daftar Isi

Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi.....	ii
Pernyataan Tanggung Jawab	ix
Ringkasan	10
I. Laporan Realisasi Anggaran	14
II. Neraca	16
III. Laporan Operasional.....	19
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	22
V. Catatan atas Laporan Keuangan	24
A. Penjelasan Umum	24
A.1. Dasar Hukum.....	24
A.2. Profil dan Kebijakan Teknis Pengadilan Agama Maumere	25
A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan.....	26
A.4. Basis Akuntansi	26
A.5. Dasar Pengukuran	27
A.6. Kebijakan Akuntansi.....	27
B. Penjelasan atas Pos-pos Realisasi Anggaran.....	50
B.1. Pendapatan Negara dan Hibah	50
B.2. Belanja.....	51
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca	56
C.1. Aset Lancar.....	56
C.2. Aset Tetap	58
C.3. Aset Lainnya	63
C.5. Kewajiban Jangka Pendek	65
C.6. Ekuitas	66

D.	Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional	67
D.1.	Pendapatan Penerimaan Negara bukan Pajak.....	67
D.2.	Beban Pegawai	67
D.3.	Beban Persediaan	68
D.4.	Beban Barang dan Jasa	69
D.5.	Beban Pemeliharaan	70
D.6.	Beban Perjalanan Dinas	70
D.7.	Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	71
D.8.	Beban Bantuan Sosial.....	71
D.9.	Beban Penyusutan dan Amortisasi	72
D.10.	Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih	73
D.11.	Beban Lain-lain.....	73
D.12.	Kegiatan Non Operasional	74
D.13.	Pos Luar Biasa	74
E.	Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas.....	75
E.1.	Ekuitas Awal	75
E.2.	Surplus (defisit) LO	75
E.3.	1. Penyesuaian Nilai Aset	75
E.3.	2 Koreksi Nilai Persediaan	75
E.3.	3 Selisih Revaluasi Aset Tetap	76
E.3.	4 Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi	76
E.3.	5 Koreksi Lain-lain	76
E.4.	Transaksi Antar Entitas.....	77
E.4.	1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL).....	77
E.4.	2 Transfer Masuk/Transfer Keluar	77
E.3.	Ekuitas Akhir.....	78
F.	Pengungkapan Penting Lainnya	78
F.1.	Kejadian-kejadian Penting setelah Tanggal Neraca	78
F.2.	Pengungkapan Lain-lain	78

Daftar dan Lampiran	80
Rincian Nilai Perolehan, Akumulasi Penyusutan, dan Nilai Buku Aset Tetap	81
Daftar Hibah Langsung.....	84

PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB

RINGKASAN

Pernyataan Tanggung Jawab

Laporan Keuangan Pengadilan Agama Maumere yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan per 31 Desember Tahun Anggaran 2021 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan Pengadilan Agama Maumere telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Maumere, 31 Desember 2021

Kuasa Pengguna Anggaran,
Sekretaris,



JUFRI ENDO, S.HI

NIP.19710421 199603 1 002

Ringkasan

Berdasarkan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 yang diubah menjadi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga, Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan kepada Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal, dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP).

Laporan Keuangan Pengadilan Agama Maumere Tahun 2018 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi :

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2021 dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan, belanja, selama periode 1 Januari 2020 s.d. 31 Desember 2021.

Realisasi Pendapatan Negara pada 31 Desember 2021 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp. 1,568,109 atau mencapai 302,14 persen dari estimasi pendapatannya sebesar Rp. 1,049,109.

Realisasi Belanja Negara pada 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp. 2,481,510,477 atau mencapai 98.59 persen dari alokasi anggaran setelah revisi sebesar Rp 2,516,986,000 (Pagu awal sebesar Rp. 2,792,680,000)

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana per 31 Desember 2021.

Neraca yang disajikan adalah hasil dari proses Sistem Akuntansi Instansi, sebagaimana yang diwajibkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah

diubah dengan 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.

Nilai Aset per 31 Desember 2021 dicatat dan disajikan sebesar Rp. 9,916,070,007 yang terdiri dari : Aset Lancar sebesar Rp. 0; Aset Tetap (neto setelah akumulasi penyusutan) sebesar Rp. 9,912,220,307; Piutang Jangka Panjang (neto setelah penyisihan piutang tak tertagih) sebesar Rp.0; dan Aset Lainnya (neto setelah akumulasi penyusutan) sebesar Rp. 3,850,000.

Nilai Kewajiban seluruhnya tersaji sebesar Rp. 0 yang terdiri dari Kewajiban Jangka Pendek sebesar Rp. 28.000.00 dan Kewajiban Jangka Panjang sebesar Rp. 0.

Nilai Ekuitas Dana disajikan sebesar Rp. 9,916,070,007

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus(defisit) dari operasi, surplus(defisit) dari kegiatan nonoperasional, surplus(defisit) sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus(defisit) -LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp. 1,568,109 sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp. 2,699,976,929 sehingga terdapat surplus (defisit) dari Kegiatan Operasional senilai (Rp. 2,698,408,820) Kegiatan Non Operasional dan Pos-Pos Luar Biasa masing-masing surplus (defisit) sebesar Rp.0 dan surplus (defisit) sebesar Rp. 0 sehingga entitas mengalami surplus (defisit) -LO sebesar (Rp. 2,698,408,820).

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp. 10,136,857,250 dikurangi surplus(defisit)-LO sebesar (Rp. 2,708,143,520) kemudian ditambah dengan koreksi-koreksi senilai Rp. 0 dan ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp. 2,480,299,577 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2021 adalah senilai Rp. 9,909,013,307.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan

Neraca. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2021, Pendapatan Negara dan Hibah dan Belanja Negara diakui berdasarkan basis kas, yaitu diakui pada saat kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas negara. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

Dalam penyajian Neraca untuk periode per 31 Desember 2021, nilai Aset, Kewajiban, dan Ekuitas Dana diakui berdasarkan basis akrual, yaitu diakui pada saat diperolehnya hak atas dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas negara.

I. LRA PERBANDINGAN

I. Laporan Realisasi Anggaran

PENGADILAN AGAMA MAUMERE
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 Desember 2020 Dan 31 Desember 2021
(dalam satuan Rupiah)

	Uraian	Catatan	31 Desember 2021			31 Desember 2020
			Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
A.	Pendapatan Negara dan Hibah	B.1				
1.	Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1.1	519,000	1,568,109	302,14	1,939,636
	Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah		519,000	1,568,109	302,14	1,939,636
B.	Belanja Negara	B.2				
1.	Belanja Pegawai	B.2.1.	1,470,234,000	1,458,332,418	99,19	1,680,622,975
2.	Belanja Barang	B.2.2.	1,009,252,000	958,678,059	97,66	897,621,400
3.	Belanja Modal	B.2.3.	37,500,000	37,500,000	98,59	23,869,000
	Jumlah Belanja Negara		2,516,986,000	2,481,510,477	98,59	2,602,113,375

**Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*

II. NERACA PERBANDINGAN

II. Neraca

PENGADILAN AGAMA MAUMERE
NERACA
PER 31 Desember 2021 Dan 31 Desember 2020
(dalam satuan Rupiah)

URAIAN	Catatan	31 Desember 2021	31 Desember 2020
ASET			
Aset Lancar	C.1		
Kas dan Bank			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1. 1.	28,000,000	28,000,000
Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)	C.1. 2.	0	0
Persediaan	C.1. 3.	0	955,000
Persediaan yang Belum Diregister	C.1. 4.	0	0
Jumlah Aset Lancar		28,000,000	28,955,500
Aset Tetap	C.2		
Tanah	C.2. 1.	4,045,410,000	4,045,410,000
Peralatan dan Mesin	C.2. 2.	2,614,253,693	2,567,403,696
Gedung dan Bangunan	C.2. 3.	6,229,115,000	6,321,255,000
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	C.2. 4.	0	0
Aset Tetap Lainnya	C.2. 5.	3,850,000	25,044,770
Konstruksi dalam Pengerjaan	C.2. 6.	0	0
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.2. 7.	(263,049,250)	(2,616,881,480)
Jumlah Aset Tetap		9,916,070,307	10,387,714,986
Aset Lainnya	C.4		
Aset tak Berwujud	C.4. 1.	4,510,000	0
Aset Lain-Lain	C.4. 2.	262,389,250	262,389,250
Aset Lainnya yang Belum Diregister	C.4. 3.	0	0
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya	C.4. 4.	(263,049,250)	(250,371,750)
Jumlah Aset Lainnya		3,850,000	0
Jumlah Aset		9,916,070,307	10,387,714,986
KEWAJIBAN			

Kewajiban Jangka Pendek	C.5		
Utang kepada Pihak Ketiga	C.5. 1.	7,057,000	0
Uang Muka dari KPPN	C.5. 2.	28,000,000	28,000,000
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		0	0
Jumlah Kewajiban		0	0
EKUITAS			
Ekuitas Dana Lancar	C.6		
Jumlah Ekuitas Dana		9,909,013,307	10,359,741,986
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas Dana		9,916,070,307	10,387,714,986

**Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*



III. LAPORAN OPERASIONAL

III. Laporan Operasional

PENGADILAN AGAMA MAUMERE
LAPORAN OPERASIONAL
PER 31 Desember 2021 Dan 30 Desember 2020
(dalam satuan Rupiah)

URAIAN	Catatan	30 September 2021	30 September 2020
Kegiatan Operasional			
Pendapatan			
Pendapatan Negara Bukan Pajak	D.1	683,561	1,509,727
Jumlah Pendapatan		683,561	1,509,727
Beban			
Beban Pegawai	D. 2	1,088,976,392	1,347,665,545
Beban Persediaan	D. 3	25,697,100	28,862,500
Beban Barang dan Jasa	D. 4	349,532,500	330,041,549
Beban Pemeliharaan	D. 5	187,565,900	155,020,500
Beban Perjalanan Dinas	D. 6	79,073,559	88,519,500
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	D. 7	0	0
Beban Bantuan Sosial	D. 8	0	0
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D. 9	135,010,201	131,763,325
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D. 10	0	0
Beban Lain-lain	D. 11	0	0
Jumlah Beban		1,865,855,652	2,081,872,919
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Operasional		(1,865,172,091)	(2,080,363,192)
Kegiatan Non Operasional			
	D. 12		
Surplus Penjualan Aset Non Lancar		0	0
Defisit Penjualan Aset Non Lancar		0	0
Defisit Selisih Kurs		0	0
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional		0	1,044,500
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		0	1,314,000

Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	269,500
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	0	1,044,500
Surplus (Defisit) Sebelum Pos Luar Biasa	0	0
Pos Luar Biasa	D. 13	0
Pendapatan PNB	0	0
Beban Perjalanan Dinas	0	0
Beban Persediaan	0	0
Surplus (Defisit) Laporan Operasional	(1,865,172,091)	(2,079,318,692)

**Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

IV. Laporan Perubahan Ekuitas

PENGADILAN AGAMA MAUMERE
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
PER 31 Desember 2021 Dan 31 Desember 2020
(dalam satuan Rupiah)

URAIAN	Catatan	31 Desember 2021	31 Desember 2020
Ekuitas Awal	E. 1	10,136,857,250	10,460,902,360
Surplus (Defisit) Laporan Operasional	E. 2	(1,865,172,091)	(2,079,318,692)
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi / Kesalahan Mendasar		0	0
Koreksi yang menambah/mengurangi ekuitas		0	0)
Penyesuaian Nilai Aset	E. 3	0	0
Koreksi Nilai Persediaan	E. 4	0	0
Selisih Revaluasi Aset Tetap	E. 5	0	0
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	E. 6	0	0
Koreksi Lain-lain	E. 7	0	0
Jumlah Lain-lain		0	0
Transaksi Antar Entitas	E. 8	1,773,174,390	1,979,131,318
KENAIKAN/ PENURUNAN EKUITAS	E. 9	(91,997,701)	(101,187,374)
Ekuitas Akhir		10,044,859,549	10,359,714,986

**Silahkan lihat Catatan atas Laporan Keuangan pada Bagian V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.*

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

V. Catatan atas Laporan Keuangan

A. Penjelasan Umum

A.1. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- c. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
- e. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-62/PB/2009 tentang Tata cara Penyajian Informasi Pendapatan dan Belanja secara AkruaI pada Laporan Keuangan;
- f. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua dan PP Nomor 45 Tahun 2013 mengenai Perubahan Ketiga atas Keputusan Presiden Nomor 42 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- h. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
- i. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor PER-80/PB/2011 tentang Penambahan dan Perubahan Akun Pendapatan, Belanja, dan Transfer pada Bagan

Akun Standar;

- j. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-42/PB/2012 tentang Penambahan dan Perubahan Akun Non Anggaran dan Neraca pada Bagan Akun Standar;
- k. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung No. 003/SEK/12/2012 mengenai Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.
- l. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat;
- m. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 270/PMK.05/2014 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Pusat
- n. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;
- o. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015.

A.2. Profil dan Kebijakan Teknis Pengadilan Agama Maumere

Visi Pengadilan Agama Maumere adalah

“Terwujudnya Pengadilan Agama Maumere yang Agung”

Misi Pengadilan Agama Maumere

- 1. Menjaga Kemandirian Pengadilan Agama Maumere.
- 2. Memberikan Pelayanan Hukum yang Prima dan Berkeadilan Kepada Pencari Keadilan.
- 3. Meningkatkan Profesionalitas dan Kredibilitas Aparatur Pengadilan Agama Maumere.
- 4. Meningkatkan Pengawasan dan Transpaaransi di Pengadilan Agama Maumere.

Untuk mewujudkan Visi dan Misi tersebut Pengadilan Agama Maumere melakukan beberapa langkah-langkah sebagai berikut :

1. Meningkatkan penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Maumere.
2. Meningkatkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan.
3. Meningkatkan mutu pelayanan.
4. Meningkatnya kemampuan aparat peradilan yang akuntabel.
5. Meningkatkan mutu pengelolaan administrasi perkara.
6. Melaksanakan penerimaan dan penyelesaian perkara.
7. Meningkatkan sumberdaya aparatur peradilan.
8. Meningkatkan pengetahuan tentang penerapan administrasi persuratan, kearsipan dan keprotokolan, humas dan keamanan.
9. Meningkatnya sarana dan prasarana yang memenuhi standar.

A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun 2021 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Kantor. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrua (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

A.4. Basis Akuntansi

Kantor menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis

kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.5. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Kantor dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.6. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2018 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kantor Pengadilan Agama Maumere adalah sebagai berikut:

(1.) Pendapatan LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(2.) Pendapatan LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut:
 - Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan
 - Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
 - Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(3.) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(4.) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(5.) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Penggolongan Kualitas Piutang

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan 2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	100%

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbedaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
 - b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah);

- c) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
 - Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
<i>Software Komputer</i>	4
<i>Franchise</i>	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

(6.) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
 - (1.) Kewajiban Jangka Pendek
 - (2.) Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
 - (3.) Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.
 - (4.) Kewajiban Jangka Panjang
 - (5.) Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

(7.) Ekuitas

- Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. Penjelasan atas Pos-pos Realisasi Anggaran

B.1. Pendapatan Negara dan Hibah

Realisasi
Pendapatan
Negara dan
Hibah : Rp
683,559

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp. 683,559 atau mencapai 131,70 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp. 519,000. Keseluruhan Pendapatan Negara dan Hibah yang diterima oleh Pengadilan Agama Maumere adalah merupakan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Lainnya.

Rincian Estimasi dan Realisasi PNBP per 31 Desember 2021
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	Estimasi Pendapatan	Realisasi	%
1.	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	519,000	683,559	131,70
2.	Penerimaan Kembali Belanja Lain-lain Tahun Anggaran Yang Lalu	0	0	0,00
3.	Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	0	0	0,00
4.	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	0	0,00
5.	Pendapatan Anggaran Lain-lain	0	0	0,00
Total Pendapatan		519,000	683,559	131,70

Adanya pendapatan sewa tanah, gedung dan bangunan pada 31 Desember Tahun 2021 sebesar Rp. 683,559 dikarenakan gedung Kantor Lama Pengadilan Agama Maumere kini difungsikan sebagai mess pegawai, sehingga terhitung mulai Juni 2017 terdapat PNBP dari sewa tanah, gedung dan bangunan. Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp. 683,559 atau mencapai 131,70 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp. 519,000.

Perbandingan realisasi PNBP 31 Desember 2021 dan 2020 disajikan dalam tabel dibawah ini :

Tabel 1 Perbandingan Realisasi PNB per 31 Desember 2021 dan 2020
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	Desember TA	Desember TA	Perubahan	
		2021	2020	Rp	%
1.	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	683,559	1,509,727	(826,168)	(120,8)
2.	Penerimaan Kembali Belanja Lain-lain Tahun Anggaran Yang Lalu	0	0	0	0
3.	Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	0	0		0
4.	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	0	0	0
5.	Pendapatan Anggaran Lain-lain	0	0	0	0
Total Pendapatan		683,559	1,509,727	(826,168)	(120,8)

B.2. Belanja

Realisasi
Belanja
Negara : Rp
1,773,667,95
1

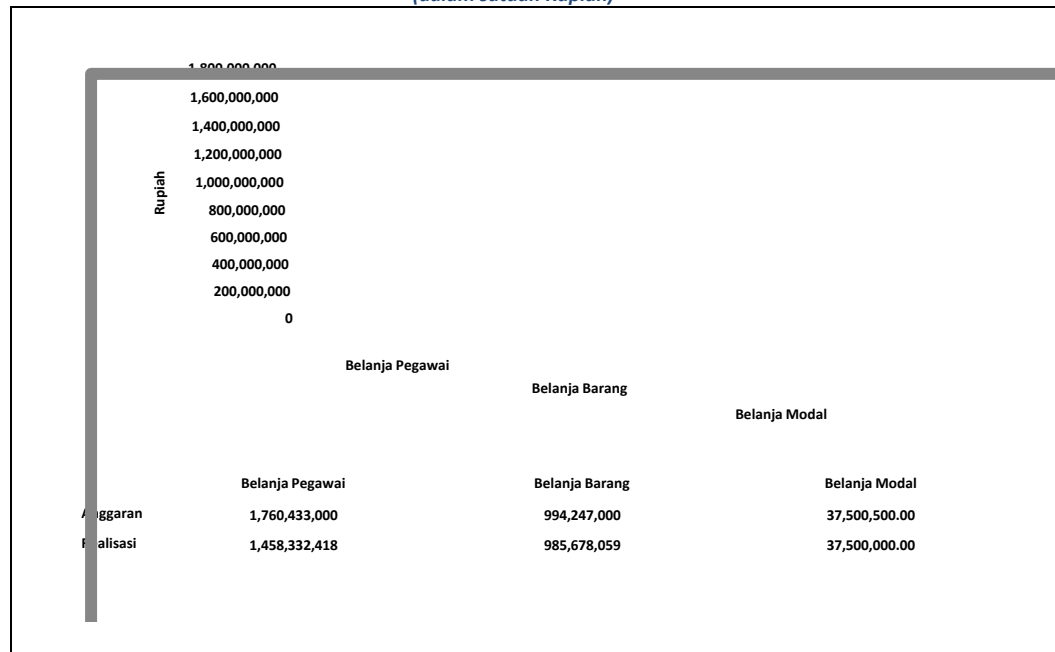
Realisasi Belanja Negara Pengadilan Agama Maumere per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp. 1,773,667,951 setelah dikurangi pengembalian belanja, atau sebesar 63,41% dari anggaran senilai Rp. 2,797,180,000. Rincian anggaran dan realisasi belanja pada 30 Juni 2018 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per 31 Desember 2021
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	31 Desember 2021		
	Pagu	Realisasi	%
Belanja Pegawai	1,760,433,000	1,088,976,392	61,86
Belanja Barang	994,247,000	642,211,559	64,59
Belanja Modal	37,500,000	37,500,000	100,00
Total Belanja Bruto	2,797,180,000	1,773,667,951	63,41
Pengembalian Belanja		0	0
Total Belanja Netto	2,797,180,000	1,773,667,951	63,41

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Komposisi Anggaran dan Realisasi Belanja per 31 Desember 2021
(dalam satuan Rupiah)



Sumber: Laporan Keuangan Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual (SAIBA) 2020& 2021

Realisasi Belanja Negara Pengadilan Agama Maumere per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp. 2,481,510,477 setelah dikurangi pengembalian belanja, atau sebesar 98,59% dari anggaran senilai Rp. 2,797,180,000. Perbandingan realisasi belanja 31 Desember 2021 dan 2020 dapat dilihat pada tabel berikut :

Perbandingan Realisasi Belanja per 31 Desember 2021 Dan 31 Desember 2020
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	31 Desember 2021	31 Desemberr 2020	Naik (Turun)	
			Rp	%
Belanja Pegawai	1,458,332,418	1,348,033,545	(259,057,153)	(23,78)
Belanja Barang	985,678,059	608,176,500	34,035,059	5,29
Belanja Modal	37,500,000	23,869,000	13,631,000	36,34
Total Belanja	2,481,510,477	1,980,011,045	(206,343,094)	(11,63)

B.2.1. Belanja Pegawai

Realisasi
Belanja
Pegawai : Rp
1,773,667,95
1

Realisasi Belanja Pegawai Pengadilan Agama Maumere per 31 Desember 2021 Dan 30 Desember 2020 adalah sebesar Rp. 1,773,667,951 dan Rp. 1,980,011,045.

Realisasi Belanja Pegawai Pengadilan Agama Maumere per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebesar Rp. Rp. 1,088,976,392 dan Rp. 1,348,033,545. Realisasi Belanja Pegawai 31 Desember 2021 mengalami penurunan sebesar (11,63) persen dibandingkan Realisasi Belanja Pegawai 2020. Hal ini disebabkan antara lain :

1. Mutasi pegawai mutasi keluar dari Pengadilan Agama Maumere, sehingga jumlah pegawai pada Tahun 2021 berkurang.

Rincian Belanja Pegawai dapat dilihat pada tabel di bawah:

Perbandingan Belanja Pegawai per 31 Desember 2021 dan 2020
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	31 Desember 2021	31 Desember 2020	Naik (Turun)	%
Beban Gaji Pokok PNS	412,108,200	470,627,800	(58,519,600)	(14,20)
Beban Pembulatan Gaji PNS	8,421	6,289	2,132	25,31
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	29,602,460	36,449,630	(6,847,170)	(23,13)
Beban Tunj. Anak PNS	6,755,365	10,608,306	(3,852,941)	(57,03)
Beban Tunj. Struktural PNS	15,250,000	18,190,000	(2,940,000)	(19,27)
Beban Tunj. Fungsional PNS	443,810,000	595,710,000	(151,900,000)	(34,22)
Beban Tunj. PPh PNS	52,208,175	72,247,180	(20,039,005)	(38,38)
Beban Tunj. Beras PNS	22,377,780	23,681,340	(1,303,560)	(5,82)
Beban Uang Makan PNS	62,656,000	69,270,000	(6,614,000)	(10,55)
Beban Tunjangan Umum PNS	3,700,000	1,295,000	2,405,000	65,00
Beban Tunjangan Kemahalan	40,500,000	49,950,000	(9,450,000)	(23,33)
Hakim				
Total Belanja Brutto	1,088,976,392	1,348,035,545	(259,059,153)	(23,78)
Pengembalian Belanja	0	0	0	0
Total Belanja Netto	1,088,976,392	1,348,035,545	(259,059,153)	(23,78)

B.2.2. Belanja Barang

*Realisasi
Belanja
Barang : Rp
642,211,559*

Realisasi Belanja Barang Pengadilan Agama Maumere per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebesar Rp. 642,211,559 dan Rp. 608,106,500.

Realisasi Belanja Barang 31 Desember 2021 mengalami kenaikan sebesar 5,31 persen dibandingkan Realisasi Belanja Barang 2020. Hal ini disebabkan antara lain:

1. Kenaikan Belanja Barang Operasional
2. Kenaikan Belanja Barang Non Operasional
3. Kenaikan Belanja Jasa
4. Kenaikan Belanja Pemeliharaan
5. Kenaikan Belanja Perjalanan Dinas

Rincian Belanja Barang dapat dilihat pada tabel berikut :

Perbandingan Belanja Barang per 31 Desember 2021 dan 2020
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	31 Desember 2021	31 Desember 2020	Perubahan (Naik/ Turun)	
	Realisasi	Realisasi	Rp	%
Belanja Barang Operasional	276,681,000	262,098,500	14,582,500	5,27
Belanja Barang Non Operasional	4,980,000	0	4,980,000	100,00
Belanja Jasa	72,990,500	73,998,500	(1,008,000)	(1,38)
Belanja Pemeliharaan	181,756,000	147,015,500	34,740,500	19,11
Belanja Perjalanan Dinas	79,073,559	88,519,500	(9,445,941)	(11,94)
Total Belanja Brutto	615,481,059	571,632,000	43,849,059	7,12
Pengembalian Belanja	0	(370,000)	370,000	0
Total Belanja Netto	615,481,059	572,002,000	43,479,059	7,06

B.2.3. Belanja Modal

*Realisasi
Belanja
Modal :Rp
37,500,000*

Realisasi Belanja Modal Pengadilan Agama Maumere per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebesar Rp. 37,500,000 dan Rp. 23,869,000.

Realisasi Belanja Modal Pengadilan Agama Maumere per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebesar Rp.37,500,000 dan Rp.23,869,000. Realisasi Belanja Modal 30 September 2021 mengalami kenaikan sebesar 36,34 persen dibandingkan Realisasi Belanja Modal 2021. Hal ini disebabkan antara lain:

1. Adanya penambahan barang belanja modal peralatan dan mesin pada Tahun 2021 yang tidak ada pada tahun 2020.

Rincian Belanja Modal dapat dilihat pada tabel di bawah :

Perbandingan Belanja Modal per 31 Desember 2021 dan 2020
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	31 Desember 2021	31 Desember 2020	Perubahan	
			Rp	%
Belanja Modal Peralatan & Mesin	37,500,000	23,869,000	13,631,000	36,34
Belanja Modal Gedung & Bangunan	0	0	0	
Belanja Modal Lainnya	0	0	0	
Total Belanja Brutto	37,500,000	23,869,000	13,631,000	36,34
Pengembalian Belanja	0	0	0	0
Total Belanja Netto	37,500,000	23,869,000	13,631,000	36,34

C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca

Aset Lancar: Rp
1,277,500

C.1. Aset Lancar

Nilai Aset Lancar per 31 Desember 2021 dan TA 2020 adalah masing-masing sebesar Rp. 1,277,500 dan Rp. 955,500.

Aset lancar merupakan aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

Rincian Aset Lancar pada Pengadilan Agama Maumere per 31 Desember 2021 dan 2020 disajikan pada tabel di bawah:

Rincian Aset Lancar per 31 Desember 2021 dan 2020
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	31 Desember 2021	31 Desember 2020
Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0
Belanja Dibayar di Muka	0	0
Persediaan	0	955,500
Persediaan yang belum diregister	0	0
Total Aset Lancar	0	955,500

C.1.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di
Bendahara
Pengeluaran:
Rp 28,000,000

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0 yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan dibawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari Uang Persediaan yang belum dipertanggungjawabkan atau disetorkan kembali ke kas negara per tanggal neraca.

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran disajikan dalam tabel di bawah :

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran
(dalam satuan Rupiah)

No.	Jenis	30 September 2021	30 September 2020
Jumlah		28,000,000	28,000,000

C.1.2. Belanja Dibayar di Muka

*Belanja
Dibayar di
Muka: Rp 0*

Belanja Dibayar di Muka per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Belanja dibayar di muka merupakan hak yang masih harus diterima dari pihak ketiga setelah tanggal neraca sebagai akibat dari telah dibayarkannya secara penuh belanja dan membebani anggaran tahun anggaran berjalan namun barang atau jasa belum diterima.

Rincian Belanja Dibayar di Muka
(dalam satuan Rupiah)

No.	Jenis	31 Desember 2021	31 Desember 2020
Jumlah		0	0

belanja dibayar di muka merupakan hak yang masih harus diterima dari pihak ketiga setelah tanggal neraca. Belanja Dibayar di Muka per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Belanja dibayar di muka merupakan hak yang masih harus diterima dari pihak ketiga setelah tanggal neraca sebagai akibat dari telah dibayarkannya secara penuh belanja dan membebani anggaran tahun anggaran berjalan namun barang atau jasa belum diterima.

C.1.3. Persediaan

*Persediaan: Rp
1,277,500*

Persediaan per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 955,500. Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan

operasional dan untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Rincian Persediaan per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Persediaan per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020

No.	Uraian	31 Desember 2021	TA 2020
1	Barang Konsumsi	0	955,500
2	Amunisi	0	0
3	Bahan Untuk Pemeliharaan	0	0
4	Suku Cadang	0	0
5	Pita Cukai, Materai dan Leges	0	0
6	Aset Tetap atau Persediaan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat	0	0
7	Bahan Baku	0	0
8	Barang dalam Proses	0	0
9	Persediaan untuk Tujuan Strategis	0	0
10	Persediaan Barang Hasil Sitaan	0	0
11	Persediaan lainnya	0	0
Total		0	955,500

C.2. Aset Tetap

*Aset Tetap : Rp
8,719,869,717*

Nilai Aset Tetap per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 tersaji sebesar Rp. 8,719,869,717 dan Rp. 9,062,876,606. Aset Tetap yang tersaji merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan dan digunakan dalam kegiatan operasional entitas.

Rincian Aset Tetap per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut :

Rincian Aset Tetap
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	31 Desember 2021	31 Desember 2020	Perubahan
1	Tanah	4,045,410,000	4,045,410,000	0
2	Peralatan dan Mesin	2,604,903,696	2,567,403,696	37,500,000
3	Gedung dan Bangunan	6,229,115,000	6,321,255,000	(92,140,000)
4	Jalan , Irigasi, dan Jaringan	0	0	0
5	Aset Tetap Lainnya	25,234,770	25,044,770	0
6	Konstruksi dalam Pengerjaan	0	0	0
7	Software	4,510,000	3,382,500	
	Jumlah	13,172,840,216	13,226,968,216	(54,640,000)
	Akumulasi Penyusutan	(3,127,980,667)	(2,867,253,230)	(260,727,437)(
	Nilai Buku Aset Tetap	10,044,859,549	10,359,714,986	(314,855,437)

C.2.1. Tanah

Tanah: Rp
4,045,410,000

Nilai Aset Tetap berupa Tanah per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing adalah sebesar Rp. 4,045,410,000 dan Rp. 4,045,410,000.

Rincian saldo tanah per tanggal 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut :

Rincian Saldo Tanah

No.	KIB	Luas (m ²)	No. Sertifikat	Atas Nama	Peruntukan	Jumlah
1	1	272	Hak Pakai Nomor 600	Pemerintah RI cq Mahkamah Agung		250,876,000
2	3	750	Hak Pakai Nomor 310	Pemerintah RI cq Mahkamah Agung		691,754,000
3	4	3,840	Hak Pakai Nomor 18	Pemerintah RI cq Mahkamah Agung		3,102,780,000
	Jumlah					4,045,410,000

Nilai Perolehan Aset Tetap berupa Tanah per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing adalah sebesar Rp. 4,045,410,000 dan Rp. 4,045,410,000. Jadi nilai aset tanah per 31 Desember 2021 adalah Rp. 4,045,410,000.

C.2.2. Peralatan dan Mesin

*Peralatan dan
Mesin : Rp
2,604,903,696*

Nilai perolehan Aset Tetap berupa peralatan dan mesin per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing adalah sebesar Rp. 2,604,903,696 dan Rp. 2,567,403,696.

Mutasi nilai peralatan dan mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Saldo per 31 Desember 2020	2,567,403,696
Mutasi Tambah	
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	37,500,000
Mutasi Kurang	
Saldo per 30 September 2021	2,604,903,696
Akumulasi Penyusutan s.d 30 September 2021	(2,340,252,878)
Nilai Buku 30 September 2021	264,650,818

Nilai perolehan aset tetap berupa peralatan dan mesin per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing adalah sebesar 2,604,903,696 dan Rp. 2,567,403,696 karena adanya penambahan peralatan dan mesin. Realisasi belanja dalam rangka perolehan aset peralatan dan mesin pada semester II Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar Rp. 2,567,403,696,-. Sedangkan perolehan Peralatan dan Mesin dari pembelian adalah sebesar Rp. 37,500,000,-. Selisih realisasi belanja modal dengan hasil perolehan aset dari pembelian merupakan kapitalisasi aset yang perolehannya bersumber dari belanja barang namun memenuhi kriteria sebagai Peralatan dan Mesin. Rincian aset tetap Peralatan dan Mesin disajikan pada Lampiran A Laporan Keuangan ini.

C.2.3. Gedung dan Bangunan

*Gedung dan
Bangunan : Rp
6,229,115,000*

Nilai perolehan Aset Tetap berupa Gedung dan Bangunan per 31 September 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing adalah sebesar Rp. 6,229,115,000 dan Rp. 6,321,225,000.

Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2021	6,229,115,000
Mutasi Tambah	
Mutasi Kurang	
Saldo per 30 September 2021	6,229,115,000
Akumulasi Penyusutan s.d 30 September 2021	(528,528,539)
Nilai Buku 30 September 2021	5,700,586,461

Nilai perolehan asset Tetap berupa gedung dan bangunan per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing adalah sebesar Rp. 6,229,115,000 dan Rp. 6,321,225,000. Nilai perolehan Aset Tetap berupa Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing adalah sebesar Rp. 6,229,115,000 dan Rp. 6,321,225,000. Rincian aset tetap Gedung dan Bangunan disajikan pada Lampiran A Laporan Keuangan ini.

C.2.4. Jalan , Irigasi, dan Jaringan

Aset Jalan ,
Irigasi, dan
Jaringan : Rp
0

Nilai perolehan Aset Tetap berupa Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. Rp. 0.

Mutasi nilai Jalan, Irigasi, dan Jaringan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Saldo per TA 2021	0
Mutasi Tambah	
Mutasi Kurang	
Saldo per 31 Desember 2021	0
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2021	0
Nilai Buku 31 Desember 2021	0

Nilai perolehan aset tetap berupa jalan, irigasi dan jaringan per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. Rp. 0. Nilai perolehan Aset Tetap berupa Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. Rp. 0. Rincian aset tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan disajikan pada Lampiran A Laporan Keuangan ini.

C.2.5. Aset Tetap Lainnya

*Aset Tetap
Lainnya: Rp
25,234,770*

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Nilai perolehan Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing adalah sebesar Rp. 25,044,770 dan Rp. 25,044,770.

aset tetap lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam Tanah, perlatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Nilai perolehan Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing adalah sebesar Rp. 25,234,770 dan Rp. 25,044,770.

Mutasi nilai Aset Tetap Lainnya tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Saldo per 31 Desember 2021	25,234,770
Mutasi Tambah	
Mutasi Kurang	
Saldo per 31 Desember 2021	25,234,770
Akumulasi Penyusutan s.d 31 Desember 2021	0
Nilai Buku 31 Desember 2021	25,234,770

Nilai dan perhitungan penyusutan dan akumulasinya disajikan pada Lampiran A Laporan Keuangan ini.

C.2.6. Konstruksi dalam Pengerjaan

Konstruksi
dalam
Pengerjaan :
Rp 0

Saldo Konstruksi dalam Pengerjaan per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2021 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0.

C.2.7. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Akumulasi
Penyusutan
Aset tetap : Rp
(3,127,980,667
)

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing Rp (3,127,980,667) dan Rp. (2,867,253,230).

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP).

Rangkuman Akumulasi Penyusutan Aset Tetap 31 Desember 2021 disajikan pada tabel di bawah, sedangkan Rincian akumulasi penyusutan aset tetap disajikan pada Lampiran A Laporan Keuangan ini.

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	2,604,903,696	(2,340,252,878)	264,650,818
2	Gedung dan Bangunan	6,229,115,000	(528,528,539)	7,700,586,461
3	Jalan , Irigasi, dan Jaringan	0	0	0
4	Aset Tetap Lainnya	25,234,770	(25,044,770)	25,234,770
	Jumlah	8,859,253,466	(2,893,826,187)	7,990,472,049

Aset Lainnya:
Rp 25,234,770

C.3. Aset Lainnya

Nilai Perolehan Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing adalah sebesar Rp. 25,234,770 dan Rp. 25,044,770. Aset Lainnya merupakan aset yang tidak dapat dikelompokkan, baik ke dalam aset lancar maupun aset tetap.

Rincian Aset Lainnya
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	31 Desember 2021	31 Desember 2020
1	Aset tak Berwujud	4,510,000	4,510,000
2	Aset Lain-lain	262,389,250	262,389,250
3	Aset Lainnya yang belum diregister	0	0
	Nilai perolehan Aset Lainnya	266,899,250	266,899,250
	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	259,199,250	250,371,750
	Nilai buku Aset Lainnya	7,700,00	16,527,500

C.4.1. Aset tak berwujud

Aset tak
Berwujud :
Rp 4,510,000

Saldo aset tak berwujud (ATB) per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing adalah sebesar Rp. 4,510,000 dan Rp. 4,510,00. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik.

Adapun rincian ATB per 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

Rincian Aset tak Berwujud
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	Nilai
	Jumlah Total	4,510,000

saldo aset tak berwujud per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp. 4,510,000 dan Rp. 4,510,000. aset tak berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki. Saldo aset tak berwujud (ATB) per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing adalah sebesar Rp. 4,510,000 dan Rp. 4,510,000. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik.

Aset Tak Berwujud pada Pengadilan Agama Maumere berupa software yang digunakan untuk menunjang operasional kantor. Tidak terdapat mutasi untuk aset tidak berwujud

selama Tahun 2021.

C.4.2. Aset Lain-lain

*Aset Lain-lain :
Rp 262,389,250*

Saldo aset lain-lain per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing adalah sebesar Rp. 262,389,250 dan Rp. 262,389,250. Aset Lain-lain merupakan barang milik negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional Pengadilan Agama Maumere serta dalam proses penghapusan dari BMN.

Mutasi aset lain-lain dapat dilihat pada tabel di bawah :

Saldo per 31 Desember 2021	262,389,250
Mutasi Tambah	
Mutasi Kurang	
Saldo per 30 Juni 2018	262,389,250

saldo asset lain-lain per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp. 262,389,250 dan Rp. 262,389,250. asset lain-lain merupakan barang milik Negara yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional. Saldo aset lain-lain per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing adalah sebesar Rp. 262,389,250 dan Rp. 262,389,250. Aset Lain-lain merupakan barang milik negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional Pengadilan Agama Maumere serta dalam proses penghapusan dari BMN

C.5. Kewajiban Jangka Pendek

*Kewajiban
Jangka Pendek
:
Rp 0*

Nilai Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Kewajiban Jangka Pendek merupakan kelompok kewajiban yang diharapkan segera diselesaikan dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Rincian Kewajiban Jangka Pendek pada Pengadilan Agama Maumere per 31 Desember 2021 disajikan pada tabel di bawah :

Rincian Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	31 Desember 2021	31 Desember 2020
Jumlah	0	0

C.5.1. Utang kepada Pihak Ketiga

Utang kepada
Pihak Ketiga:
Rp0

Jumlah Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan).

Adapun rincian Utang Pihak Ketiga Pengadilan Agama Maumere per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Rincian Utang kepada Pihak Ketiga

No.	Uraian	Jumlah	Penjelasan
Jumlah		0	0

C.5.2. Uang Muka dari KPPN

Uang Muka
dari KPPN:
Rp.28,000,000

Saldo Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing adalah sebesar Rp. 28,000,000 dan Rp. 28,000,000. Uang Muka dari KPPN merupakan uang persediaan (UP) atau tambahan uang persediaan (TUP) diberikan KPPN sebagai uang muka kerja yang masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan. Uang Muka dari KPPN adalah akun pasangan dari Kas di Bendahara Pengeluaran yang ada di kelompok akun Aset Lancar.

C.6. Ekuitas

Cadangan
Piutang:
Rp
10,044,859,549

Ekuitas per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2021 adalah masing-masing sebesar Rp 10,044,859,549 dan Rp 10,359,714,986. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

Per tanggal 31 Desember 2021 terdapat penurunan nilai Kewajiban sebesar Rp. 314,855,437 (3,13%) dari nilai per TA 2020. Jumlah nilai Kewajiban pada periode yang berakhir tanggal 30 September 2021 adalah sebesar Rp 10,044,859,549 sedangkan per TA 2020 tercatat sebesar Rp. 10,359,714,986

D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional

D.1. Pendapatan Penerimaan Negara bukan Pajak

*Pendapatan
PNBP : Rp
683,559*

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp 563,069 dan Rp 4,537,586. Pendapatan tersebut terdiri dari:

Rincian Estimasi dan Realisasi PNBP per 31 Desember 2021
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	Estimasi Pendapatan	Realisasi	%
1.	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	519,000	683,559	31,7
2.	Penerimaan Kembali Belanja Lain-lain Tahun Anggaran Yang Lalu	0	0	0
3.	Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	0	0	0)
4.	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	0	0
5.	Pendapatan Anggaran Lain-lain	0	0	0
Total Pendapatan		519,000	683,559	31,7

D.2. Beban Pegawai

*Beban Pegawai
: Rp
1,088,976,392*

Jumlah Beban Pegawai untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp 1,088,976,392 dan Rp. 1,348,035,545. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh

pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Rincian Belanja Pegawai dapat dilihat pada tabel di bawah:

Rincian Beban Pegawai per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	31 Desember 2021	31 Desember 2020	Naik(Turun)	%
Beban Gaji Pokok PNS	412,108,200	470,627,800	(58,519,600)	(14,20)
Beban Pembulatan Gaji PNS	8,421	6,289	2,132	25,32
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	29,602,460	36,449,630	(6,847,170)	(23,13)
Beban Tunj. Anak PNS	6,755,356	10,608,306	(3,852,950)	(57,04)
Beban Tunj. Struktural PNS	15,250,000	18,190,000	(2,940,000)	(19,28)
Beban Tunj. Fungsional PNS	443,810,000	595,710,000	(151,900,000)	(34,23)
Beban Tunj. PPh PNS	52,208,175	72,247,180	(20.039,005)	(38,38)
Beban Tunj. Beras PNS	22,377,780	23,681,340	(1,303,560)	(5,83)
Beban Uang Makan PNS	62,656,000	69,270,000	(6,614,000)	(10,56)
Beban Tunjangan Umum PNS	3,700,000	1,295,000	2,405,000	65,00
Beban Tunjangan Kemahalan	40,500,000	49,950,000	(9,450,000)	(23,79)
Hakim				
Jumlah Beban Pegawai	1,088,976,392	1,348,035,545	(259,059,153)	(23,8)

D.3. Beban Persediaan

*Beban
Persediaan :
Rp.1,277,500*

Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp. 1,277,500 dan Rp. 955,500. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Persediaan per 31 Dese 2021 dan 30 September 2020
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	30 September 2021	30 September 2020	Naik(Turun)	%
Beban Persediaan Konsumsi	1,277,500	955,500	322,000	25,20
Beban Persediaan Pita Cukai, Materei dan Leges	0	0	0	0
Beban Persediaan Bahan Baku	0	0	0	0
Beban Persediaan Lainnya	0	0	0	0
Total Beban Persediaan	1,277,500	955,500	322,000	25,20

D.4. Beban Barang dan Jasa

*Beban Jasa :
Rp.327,431,500*

Jumlah Beban Jasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp.271,093,300 dan Rp. 258,615,000. Beban Jasa adalah konsumsi atas jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas. Rincian Beban Jasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Barang dan Jasa per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	31 Desember 2021	31 Desember 2020	Naik(Turun)	%
Beban Keperluan Perkantoran	219,369,000	215,059,500	4,309,500	1,96
Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	0	0	0	0
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	1,266,000	2,652,500	(1,386,500)	(109,52)
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	32,530,000	28,810,000	3,720,000	11,44
Beban Operasional Lainnya	21,076,000	15,576,500	5,499,500	26,09
Beban Bahan	0	0	0	0
Beban Langganan Listrik	43,919,500	48,532,500	(4,613,000)	(10,50)
Beban Langganan Telepon	9,271,000	9,626,000	(355,000)	(3,83)
Total Beban Barang dan Jasa	327,431,500	320,257,000	7,174,500	2,19

D.5. Beban Pemeliharaan

*Beban
Pemeliharaan:
Rp.181,756,000*

Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp. 196,308,000 dan Rp.145,210,472. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian beban pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Pemeliharaan 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	31 Desember 2021	31 Desember 2020	Naik(Turun)	%
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	88,547,500	74,052,500	14,495,000	16,36
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	66,208,500	45,963,000	20,245,500	30,57
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	27,000,000	27,000,000	0	0
Beban Persediaan Bahan Untuk Pemeliharaan	0	0	0	0
Total Beban Pemeliharaan	181,756,000	147,015,500	34,740,500	19,11

D.6. Beban Perjalanan Dinas

*Beban
Perjalanan
Dinas :
Rp.79,073,559*

Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp. 79,073,559 dan Rp. 88,519,500. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Perjalanan Dinas per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	31 Desember 2021	31 Desember 2020	Naik(Turun)	%
Beban Perjalanan Biasa	79,073,559	88,519,500	(9,445,941)	(11,94)
Total Beban Perjalanan Dinas	79,073,559	88,519,500	(9,445,941)	(11,94)

D.7. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

*Beban Barang
untuk
Diserahkan
kepada
Masyarakat :
Rp 0*

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp. 0. dan Rp. 0. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan instansi dalam hal meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai akuntansi berbasis akrual yang sudah mulai diterapkan pada tahun 2016. Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

**Rincian Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat
per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020
(dalam satuan Rupiah)**

Uraian	31 Desember 2021	TA 2020	Naik(Turun)	%
Beban Gedung dan Bangunan untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	0	0	0	0
Beban Peralatan dan Mesin untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	0	0	0	0
Beban Barang Lainnya untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda	0	0	0	0
Total Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	0	0	0	0

D.8. Beban Bantuan Sosial

*Beban Bantuan
Sosial : Rp 0*

Beban Bantuan Sosial Tahun Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp. 0. dan Rp. 0. Beban bantuan sosial merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif. Rincian Beban Bantuan Sosial Dinas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Bantuan Sosial
per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	31 Desember 2021	31 Desember 2020	Naik(Turun)	%
Beban Bantuan Sosial untuk Rehabilitasi Sosial	0	0	0	0
Beban Bantuan Sosial untuk Jaminan Sosial	0	0	0	0
Beban Bantuan Sosial untuk Pemberdayaan Sosial	0	0	0	0
Total Beban Bantuan Sosial	0	0	0	0

D.9. Beban Penyusutan dan Amortisasi

*Beban
Penyusutan
dan Amortisasi
:
Rp.2,873,291,4
17*

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp. 491,070,639 dan Rp. 507,404,801. Beban Penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi
Per 31 Desember 2021 dan 30 Desember 2020
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	31 Desember 2021	31 Desember 2020	Naik (Turun)	%
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	2,340,252,878	2,234,755,630	105,497,248	4,50
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	528,528,539	382,125,850	146,402,689	27,70
Jumlah Penyusutan				
Beban Amortisasi Software	4,510,000	3,382,500	1,127,500	25,00
Beban Penyusutan Aset lain- lain	0	0	0	
Jumlah Amortisasi	0	0	0	

Total Beban Penyusutan dan Amortisasi	2,873,291,417	2,620,263,980	253,027,437	8,80
---------------------------------------	---------------	---------------	-------------	------

D.10. Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih

*Beban
Penyisihan
Piutang tak
Tertagih : Rp 0*

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidakterttagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

**Rincian Beban Piutang tak Tertagih
per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020
(dalam satuan Rupiah)**

Uraian	31 Desember 2021	31 Desember 2020	Naik(Turun)	%
Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih – Piutang Jangka Pendek	0	0	0	0
Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang	0	0	0	0
Total Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih	0	0	0	0

D.11. Beban Lain-lain

*Beban Lain-Lain
: Rp 0*

Jumlah Beban Lain-lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 30 September 2020 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Beban Lain-lain merupakan beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian atas Belanja Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

**Rincian Beban Lain-lain
per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020
(dalam satuan Rupiah)**

Uraian	31 Desember 2021	31 Desember 2020	Naik(Turun)	%
Beban Aset Ekstrakomtabel Peralatan dan Mesin	0	0	0	0

Beban Aset Ekstrakomptabel	0	0	0	0
Gedung dan Bangunan				
Beban Aset Ekstrakomptabel	0	0	0	0
Aset Tetap Lainnya				
Total Beban Lain-lain	0	0	0	0

D.12. Kegiatan Non Operasional

*Beban Kegiatan
Non
Operasional :
Rp 0*

Pos Surplus (defisit) dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus(defisit) dari Kegiatan Non Operasional penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian atas Belanja Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

**Rincian Kegiatan Non Operasional
per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020
(dalam satuan Rupiah)**

Uraian	31 Desember 2021	31 Desember 2020	Naik (Turun)	%
Surplus Penjualan Aset Non Lancar	0	0	0	0
Penjualan Alat Angkut Darat	0	0	0	0
Defisit Penjualan Aset Non Lancar	0	0	0	0
Penjualan Alat Kantor				
Total Surplus(defisit) dari kegiatan Non Operasional	0	0	0	0

D.13. Pos Luar Biasa

*Beban Pos Luar
Biasa : Rp 0*

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas. Rincian Pos Luar Biasa untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Rincian Pos Luar Biasa
per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	31 Desember 2021	31 Desember 2020	Naik(Turun)	%
Pendapatan PNPB	0	0	0	0
Beban Perjalanan Dinas	0	0	0	0
Beban Persediaan	0	0	0	0
Total Pos Luar Biasa	0	0	0	0

E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas

E.1. Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp. 10,044,859,549 dan Rp. 10,359,714,986

E.2. Surplus (defisit) LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp. (1,865,172,091) dan Rp. (2,080,363,192). Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

E.3. 1. Penyesuaian Nilai Aset

Nilai Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan akhir

E.3.2 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi nilai persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 Dan Rp. 0. Rincian Koreksi Nilai untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 49 Rincian Koreksi Nilai Persediaan
31 Desember 2021
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	Koreksi
Barang Konsumsi	0
Suku Cadang	0
Barang Persediaan Lainnya	0
Total Koreksi Nilai Persediaan	0

E.3.3 Selisih Revaluasi Aset Tetap

- Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0.

E.3.4 Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi

- Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp.0 dan Rp.0. Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai.

E.3.5 Koreksi Lain-lain

Koreksi Lain-lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang. Koreksi lain-lain terdiri dari :

Tabel 50 Rincian Koreksi Lain-lain
per 31 Desember 2021
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	Koreksi
Koreksi beban	0
Koreksi Pendapatan	0
Koreksi Piutang	0
Koreksi Kewajiban	0
Koreksi hibah	0
Jumlah	0

E.4. Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi antar Entitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp. 1,773,174,390 dan Rp. 1,978,131,318

Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN.

**Tabel 51 Rincian Nilai Transaksi antar Entitas
per 31 Desember 2021
(dalam satuan Rupiah)**

Transaksi antar Entitas	Nilai
Diterima dari Entitas Lain	(683,561)
Ditagihkan ke Entitas Lain	1,773,667,951
Transfer Masuk	190,000
Transfer Keluar	
Pengesahan Hibah Langsung	
Pengesahan Pengembalian hibah Langsung	
Jumlah	1,773,174,390

E.4.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 31 Desember 2021, DDEL sebesar Rp. (683,561) sedangkan DKEL sebesar Rp. 1,773,667,951

E.4.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung KL dalam bentuk kas, barang maupun jasa sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan oleh BA-BUN. Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan tanggal 31 Desember 2021, sebesar Rp. 0,- dari total Rp. 0,- yang diterima sepanjang Tahun 2021.

Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan

pengembalian hibah langsung entitas. Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung sampai dengan tanggal 31 Desember 2021, adalah Rp. 0.

Rincian pengesahan Hibah untuk Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

No	Pemberi Hibah	Bentuk Hibah	Nilai Hibah
1	WHO	Uang	
2	ABC	Barang	

Rincian Penerimaan Hibah Langsung Tahun 2021 disajikan pada lampiran

E.3. Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah masing-masing sebesar Rp.10,044,859,459 dan Rp. 10,359,714,986

F. Pengungkapan Penting Lainnya

F.1. Kejadian-kejadian Penting setelah Tanggal Neraca

Tidak kejadian – kejadian penting setelah tanggal neraca.

F.2. Pengungkapan Lain-lain

F.2.1. Temuan dan Tindak lanjut Temuan BPK

Tidak ada temuan dan tindak lanjut dari temuan BPK.

F.2.2. Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrua

Tidak ada pendapatan dan belanja secara akrual.

F.2.3. Rekening Pemerintah

Rekening pemerintah yang digunakan dalam kegiatan operasional Pengadilan Agama Maumere adalah

1. BPg 040 Pengadilan Agama Maumere. 01 nomor rekening 653244028511000 (BRI) a.n Bendahara Pengeluaran untuk penampung DIPA BUA dengan izin pembukaan rekening nomor Menteri Keuangan S-762/PB.3/2021 tanggal 21/04/2021

2. BPG 040 Pengadilan Agama Maumere 04 no rekening 9893004028521000 (BNI) a.n Bendahara Pengeluaran untuk penampung DIPA BADILAG dengan izin pembukaan rekening nomor KPPN No. S-1632/WPB.12/KP.06/2020 tanggal 19/06/2020
3. RPL 040 PA MAUMERE UNTUK PDT BIAYA PERKARA Nomor Rekening 0162741943 (BNI) a.n Bendahara Pengeluaran untuk penampung Biaya perkara / Titipan pihak ke 3 dengan izin pembukaan rekening nomor Menteri Keuangan No. S-6659/MK.5/2015 tgl 10/08/2015.

F.2.4. Revisi DIPA

F.2.5. Ralat SPM, SSBP, dan SSPB

Dilakukan ralat SPM sebanyak 2 spm dengan nomor SPM (tanggal) 00052 (16 Juni 2021) dan 00051 (15 Juni 2021) hal ini dilakukan karena adanya kesalahan dalam kode akun pendapatan anggaran dan lain-lain serta belanja keperluan perkantoran.

F.2.6. Catatan Penting Lainnya

Kuasa Pengguna Anggaran : Jufri Endo, S.HI

Pejabat Pembuat Komitmen : Abdullah, S.H, M.H

Pejabat Penandatanganan/penguji SPM : Muhammad Rizki, SH

Bendahara : Hamzah Usman

DAFTAR DAN LAMPIRAN

*A. RINCIAN NILAI PEROLEHAN,
AKUMULASI PENYUSUTAN, DAN
NILAI BUKU ASET TETAP*

Pengadilan Agama Maumere

Rincian Nilai Perolehan, Akumulasi Penyusutan, dan Nilai Buku Aset Tetap untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2021

No.	Aset Tetap	Kuantitas	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan sd Periode Ini	Beban Penyusutan	Total Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
					2021	Per 31 Desember 2021	Per 31 Desember 2021
A.	Peralatan dan Mesin	389	2,611,746,196	2,292,033,004	55,092,374	2,347,095,379	264,650
1.	Alat Angkutan Darat Bermotor	6	390,018,828	390,018,828	0	390,018,828	
2.	Alat Kantor	90	284,789,000	273,331,000	5,486,000	278,817,000	5,972
3.	Alat Rumah Tangga	210	1,090,560,178	1,090,560,178	0	1,090,560,178	
4.	Alat Studio	5	14,136,000	7,040,800	1,013,600	8,054,400	6,081
5.	Alat Komunikasi	17	15,842,200	15,842,200	0	15,842,200	
6.	Peralatan Pemancar	3	152,850,000	39,975,000	7,625,000	47,600,000	105,250
7.	Komputer Unit	39	475,964,600	347,409,976	28,295,700	375,705,676	100,258
8.	Peralatan Komputer	19	187,585,390	127,825,022	12,672,074	140,497,096	47,088
B.	Gedung dan Bangunan	6	6,229,115,000	453,024,462	75,504,077	528,528,539	5,700,000
1.	Bangunan Gedung Tempat Kerja	3	5,006,257,000	368,857,032	61,476,172	430,333,204	4,575,923
2.	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	1	785,775,000	55,466,472	9,244,412	64,710,884	721,064
3.	Tugu/tanda Batas	2	437,083,000	28,700,958	4,783,493	33,484,451	403,598

C.	Jalan, Irigasi, dan Jaringan						
1.	Jaringan Gardu Listrik						
D.	Aset Tetap Lainnya						
1.	Barang Bercorak Kesenian						
E.	Aset Tetap yang Tidak Digunakan	190	265,950,168	254,400,168	3,850,000	258,250,168	7,700
1.	Alat Angkutan Darat Bermotor	1	5,118,000	5,118,000	0	5,118,000	
2.	Alat Ukur	1	50,000	50,000	0	50,000	
3.	Alat Kantor	37	29,823,000	29,823,000	0	29,823,000	
4.	Alat Rumah Tangga	106	58,457,250	58,457,250	0	58,457,250	
5.	Alat Studio	2	20,800,000	14,950,000	1,950,000	16,900,000	3,900
6.	Alat Komunikasi	11	21,367,000	15,667,000	1,950,000	17,567,000	3,800
7.	Peralatan Pemancar	3	4,935,000	4,935,000	0	4,935,000	
8.	Komputer Unit	9	71,700,000	71,700,	0	71,700,000	
9.	Peralatan Komputer	19	53,249,918	53,249,918	0	53,249,918	
10.	Peralatan Olah Raga	1	450,000	450,000	0	450,000	
	Total		9,106,811,364	2,999,427,634	134,446,451	3,133,874,085	5,972,937

B. DAFTAR HIBAH LANGSUNG

Pengadilan Agama Maumere
Daftar Hibah Langsung berupa Uang/Barang/Jasa
untuk Periode yang Berakhir pada 31 Desember 2021

No.	Nama Pemberi Hibah	Bentuk Hibah	Sumber Dana	Nilai Hibah	Sudah Disahkan	Belum Disahkan	
						Nilai	Keterangan
	Jumlah :						